

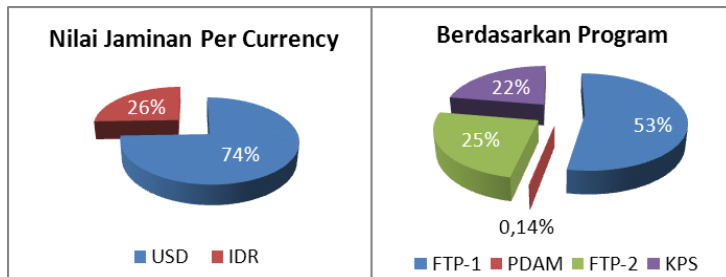
# Perkembangan Pengelolaan Kewajiban Kontinjensi Triwulan III 2013

## A. Jumlah Eksposur Yang Dimiliki

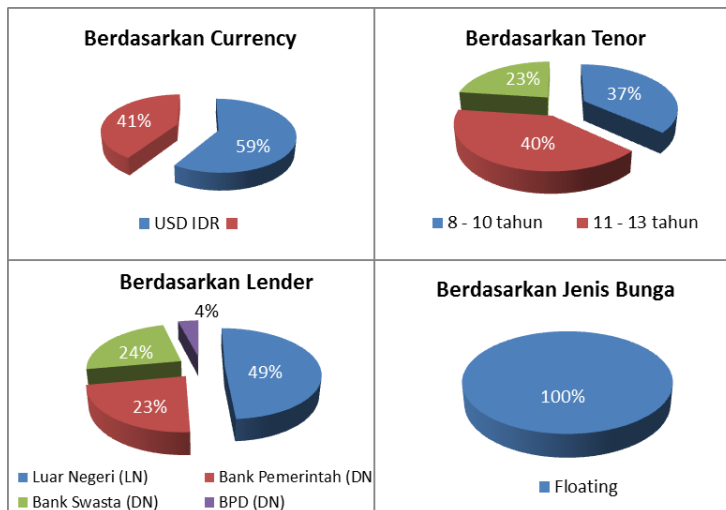
Jumlah eksposur yang timbul dari 4 (empat) program penjaminan yang telah diterbitkan Pemerintah adalah sebagai berikut:

Program	Pihak Terjamin	Jumlah Surat Jaminan	Nilai Penjaminan	Outstanding Per 31 Juni '13	Outstanding Per 31 Sept '13
<b>A. Penjaminan Kredit</b>					
a. Fast Track Program Tahap 1	PT. PLN (Persero)	USD 11 IDR 23	3.958.718.574,41 36.105.992.211.891	3.227.945.734 22.987.429.435.020	3.223.622.734 22.157.879.454.242
b. Percepatan Penyediaan Air Minum	PDAM	IDR 5	205.161.000.000	121.734.898.752	120.645.640.854
<b>B. Penjaminan Investasi</b>					
c. Fast Track Program Tahap 2	IPP	USD 5	3.503.701.488	-	-
d. Kerjasama Pemerintah Swasta	Badan Usaha Swasta	USD 1	3.200.000.000	-	-
<b>Total</b>		<b>USD IDR</b>	<b>10.662.420.062,41 36.311.153.211.891</b>	<b>3.227.945.734 23.109.164.333.772</b>	<b>3.223.622.734 22.278.525.095.096</b>

### Komposisi Nilai Total Penjaminan Pemerintah per akhir September 2013



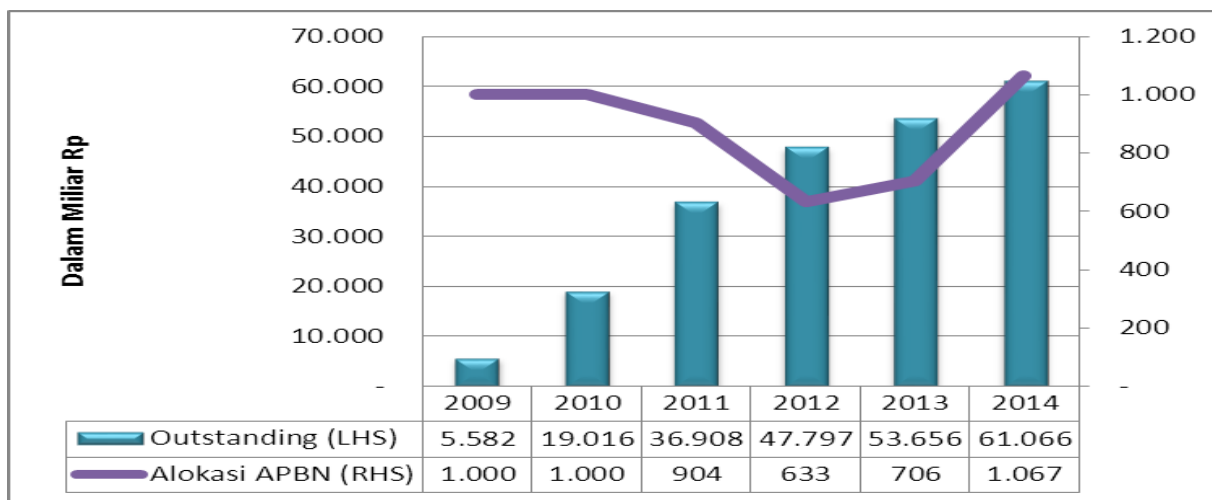
### Komposisi Outstanding Penjaminan Kredit per akhir September 2013



## B. Alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan Dalam APBN

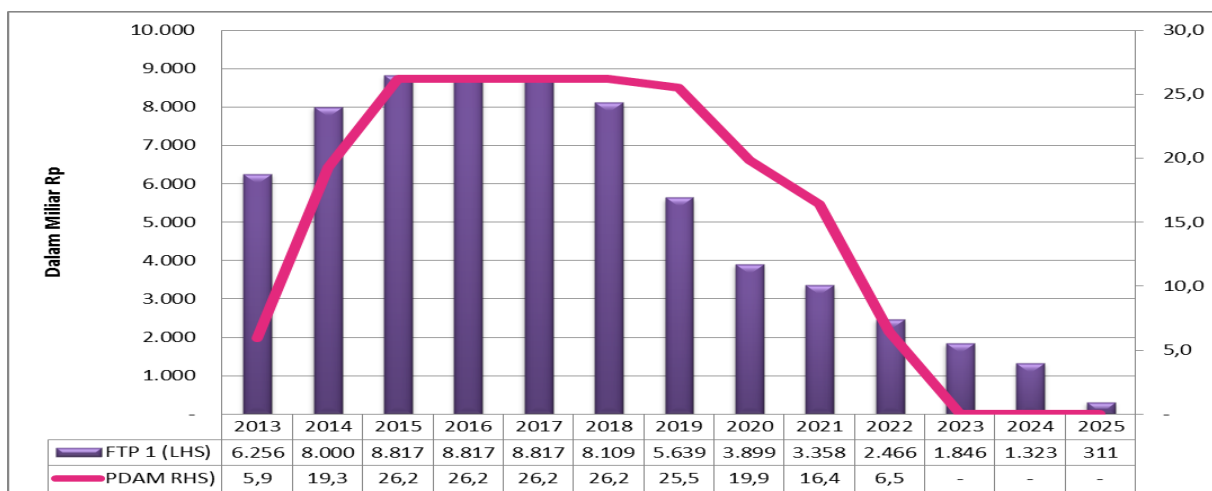
Program	Alokasi APBN Tahun 2012	Alokasi APBN Tahun 2013	Alokasi APBN Tahun 2014
Fast Track Program Tahap 1	Rp. 623.340.000.000,-	Rp.611.215.000.000,-	Rp.1.017.886.000.000,-
Percepatan Penyediaan Air Minum	Rp.10.000.000.000,-	Rp.35.000.000.000,-	Rp.2.113.000.000,-
Kerjasama Pemerintah Swasta	-	Rp.59.820.000.000,-	Rp.46.683.000.000,-
<b>Total Alokasi</b>	<b>Rp. 633.340.000.000,-</b>	<b>Rp. 706.035.000.000,-</b>	<b>Rp.1.066.682.000.000,-</b>

### Outstanding Penjaminan dan Alokasi Anggaran Penjaminan Tahun 2009 – 2014



Anggaran kewajiban penjaminan di APBN dialokasikan berdasarkan perhitungan *probabilitas default* dari pihak terjamin (PT PLN dan PDAM) terhadap total outstanding penjaminan. Sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini tidak pernah terjadi klaim sehingga alokasi anggaran kewajiban penjaminan dalam APBN tidak pernah digunakan. Hal ini dikarenakan pihak terjamin mampu memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang jatuh tempo.

### Profil Jatuh Tempo Penjaminan Kredit per akhir September 2013



## C. Pengelolaan Kewajiban Kontinjensi Terkait Pemberian Jaminan Pemerintah

### 1. Pengelolaan dan Mitigasi Risiko Dalam Rangka Penerbitan Jaminan Pemerintah

#### a. Program FTP-1

##### a. *Benchmarking* Biaya Pinjaman PT PLN (Persero) Untuk Proyek 10.000 MW

Untuk memastikan PT PLN (Persero) memperoleh pinjaman dengan biaya efisien dan sebagai langkah memitigasi risiko bagi Pemerintah, DJPU menerbitkan acuan harga pinjaman yang dijamin oleh pemerintah sebagai acuan PT PLN (Persero) dalam melakukan negosiasi pinjaman dengan kreditur, acuan harga pinjaman tersebut merupakan batas tertinggi harga pinjaman yang akan diberikan Jaminan Pemerintah untuk proyek FTP-1.

##### b. Rekomendasi persetujuan harga pinjaman

Dalam proses rekomendasi persetujuan harga, DJPU melakukan review harga pinjaman yang telah disepakati oleh PT PLN (Persero) dan calon kreditur, untuk selanjutnya dilakukan perbandingan dengan *benchmark* pinjaman yang telah diterbitkan oleh DJPU.

##### c. Rekomendasi persetujuan penandatanganan Perjanjian Kredit

Dalam proses pemberian persetujuan penandatanganan Perjanjian Kredit, dilakukan *review* atas *terms & conditions* dalam draft final Perjanjian Kredit yang disampaikan oleh PT PLN (Persero). Sebagai tindak lanjut dari hasil *review*, dapat dimintakan klarifikasi dan penyampaian saran perbaikan kepada PT PLN (Persero) atas draft final Perjanjian Kredit.

##### d. Rekomendasi penerbitan Surat Jaminan Pemerintah

Salah satu syarat pengaktifan pinjaman (*conditions precedence*) dalam setiap Perjanjian Kredit adalah diterbitkannya Surat Jaminan Pemerintah oleh Menteri Keuangan. Dalam proses penerbitan surat Jaminan, DJPU bersama BKF, Setjen dan DJPB melakukan kajian atas substansi Surat Jaminan yang akan diterbitkan Pemerintah.

#### b. Program Percepatan Penyediaan Air Minum

##### a. Penetapan Bank Pemberi Kredit Investasi PDAM

DJPU melakukan penetapan Bank Pemberi Kredit untuk memastikan bahwa calon Bank Pemberi Kredit mampu dan berkomitmen dalam penyaluran kredit.

##### b. Rekomendasi Persetujuan Perjanjian Kredit

DJPU melakukan *review* atas draft final Perjanjian Kredit yang disampaikan oleh PDAM. Sebagai tindak lanjut dari hasil *review*, dapat dimintakan klarifikasi dan penyampaian saran perbaikan kepada PDAM atas draft final Perjanjian Kredit.

Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Komite untuk menyetujui pemberian jaminan, DJPU menerbitkan surat persetujuan penandatanganan Perjanjian Kredit antara PDAM dan Bank Pemberi Kredit.

#### c. Program FTP-2

##### a. DJPU bersama BKF melakukan review kelayakan financial proyek berdasarkan *financial model* yang disampaikan oleh PT PLN.

##### b. Rekomendasi Penerbitan Surat jaminan kelayakan usaha

Dalam proses penerbitan surat jaminan kelayakan usaha, DJPU bersama BKF dan Setjen melakukan review pasal-pasal dalam Perjanjian Jual Beli Listrik yang layak dijamin dan jangka waktu penjaminan yang layak diberikan.

#### d. Program KPS

##### a. Rekomendasi penjaminan proyek KPS

Dalam proses persetujuan pemberian jaminan bersama antara Pemerintah dengan BUPI, DJPU bersama dengan BKF dan Setjen melakukan kajian atas hasil evaluasi PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PII) terkait kelayakan proyek dan usulan pembagian risiko antara Pemerintah dengan PII jika dilakukan melalui penjaminan bersama.

b. Rekomendasi Penandatanganan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres.

DJPU bersama BKF dan Setjen melakukan kajian atas pasal-pasal dalam perjanjian kerjasama yang layak dijamin dan jangka waktu penjaminan yang layak diberikan.

## **2. Monitoring Potensi Gagal Bayar Pihak Terjamin**

Pemerintah (DJPU dan BKF) melakukan monitoring potensi gagal bayar pihak terjamin melalui:

- a. Analisis keuangan pihak terjamin untuk mengetahui kemampuan pembayaran kembali kredit yang jatuh tempo;
- b. Analisis *covenant*, untuk meminimalkan terjadinya *technical default* yang dapat men-*trigger* terjadinya klaim penjaminan;
- c. *Site visit* proyek yang dijamin untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan mengetahui secara dini permasalahan yang terjadi di lapangan untuk dapat dilakukan mitigasinya.

## **3. Pengelolaan Dana Cadangan**

Eksposur penjaminan Pemerintah diproyeksikan akan semakin meningkat sehingga meningkatkan kewajiban pembayaran penjaminan jika pihak terjamin tidak mampu melakukan kewajiban pembayarannya (*default*). Dalam rangka pemberian jaminan kepada kreditur atau badan usaha atas risiko default dari pihak terjamin, Pemerintah perlu menjamin ketersediaan dana yang jumlahnya sesuai kebutuhan, menjamin pembayaran klaim secara tepat waktu dan tepat jumlah. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah potensi terjadinya *cross default* bila Pemerintah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran jaminan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah melakukan upaya optimalisasi anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah yang dialokasikan dalam APBN yaitu dengan membentuk dana cadangan penjaminan Pemerintah. Dalam hal anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah tidak habis digunakan dalam tahun anggaran berjalan, maka dana tersebut dapat diakumulasikan dengan mekanisme pemindahbukuan ke dalam rekening dana cadangan penjaminan yang dibuka di Bank Indonesia untuk pembayaran kewajiban penjaminan pemerintah pada tahun anggaran yang akan datang.

## Rincian Per Program

1. Program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara (FTP I) yang dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) per 31 September 2013

No	Proyek	Lender	Loan Signing	Tenor	Grace Period	Nilai Jaminan		Outstanding
1	PLTU Suralaya	CEXIM	30/1/08	15	3	USD	284.288.744	235.244.728,80
2	PLTU Paiton	CEXIM	30/1/08	15	3	USD	330.825.515	241.102.493,23
3	PLTU Suralaya	MEGA	18/4/08	10	4	IDR	735.387.524.690	611.513.316.482,50
4	PLTU Paiton	MEGA	18/4/08	10	4	IDR	600.635.738.985	427.998746.845,83
5	PLTU Rembang	MANDIRI	18/4/08	10	3	IDR	1.911.480.000.000	1.228.808.571.430
6	PLTU Indramayu	BNI	18/4/08	10	3	IDR	1.272.913.654.892	739.900.088.897
7	PLTU Labuan	BCA	18/4/08	10	3	IDR	1.077.577.841.221	717.656.225.421,84
8	PLTU Indramayu	BOC	27/5/08	13	3	USD	592.224.258	436.707.914,40
9	PLTU Labuan USD	BNI	29/7/08	10	3	Eq. IDR	2.741.298.159.500	1.860.166.608.236
10	PLTU Pelabuhan Ratu	MEGA	29/7/08	10	4.5	IDR	1.874.314.539.154	1.288.315.088.655
11	PLTU Lampung-Sumut - PLTU Lampung - PLTU Sumatera Utara	MEGA	29/7/08	10	4	IDR	1.240.660.976.852	575.771.839.809
12	7 PLTU Luar Jawa - PLTU Kepri - PLTU Kendari - PLTU Ende - PLTU Amurang - PLTU Gorontalo - PLTU Lombok - PLTU Pulang Pisau	MEGA	29/7/08	10	5	IDR	1.498.513.102.430	977.090.715.794
13	PLTU Pacitan	BUKOPIN	29/7/08	13	5	IDR	1.045.924.241.800	915.741.287.032
14	PLTU Teluk Naga	BUKOPIN	29/7/08	13	4	IDR	1.606.612.307.950	1.417.863.578.490
15	PLTU Rembang	CDB	3/12/08	13	3	USD	261.800.000	196.350.000
16	PLTU Tanjung Awar-Awar	BNI	30/1/09	10	3	IDR	1.155.352.482.512	765.825.974.191
17	4 PLTU Luar Jawa USD - PLTU Barru - PLTU Bangka - PLTU Jayapura - PLTU Asam-Asam	BRI	30/1/09	10	3	Eq. IDR	2.074.739.748.000	972.990.062.999
18	4 PLTU Luar Jawa - PLTU Barru - PLTU Bangka - PLTU Jayapura - PLTU Asam-Asam	BRI	30/1/09	10	3	IDR	1.151.004.738.528	725.789.583.614

No	Proyek	Lender	Loan Signing	Tenor	Grace Period	Plafond		Outstanding
19	7 PLTU Luar Jawa - PLTU Kupang - PLTU Bima - PLTU Bengkayan - PLTU Belitung - PLTU Tidore - PLTU Meulaboh - PLTU Teluk Sirih	ASBANDA	24/4/09	10	3	IDR	1.805.307.699.643	843.609.800.215
20	11 PLTU Luar Jawa USD - PLTU Kendari - PLTU Ende - PLTU Amurang - PLTU Gorontalo - PLTU Kupang - PLTU Bima - PLTU Bengkayan - PLTU Belitung - PLTU Lombok - PLTU Pulang Pisau - PLTU Tidore	ASBANDA	24/4/09	10	3	Eq. IDR	2.926.692.300.357	1.292.851.649.924
21	PLTU Teluk Naga	BOC	4/5/09	13	3	USD	454.974.082	388.927.729,43
22	PLTU NAD	CEXIM	4/5/09	15	3	USD	124.339.936	104.250.897,28
23	PLTU Pelabuhan Ratu	CEXIM	4/5/09	15	3	USD	481.937.182	423.434.438,17
24	PLTU Pacitan	CEXIM	17/7/09	15	3	USD	293.226.064	248.636.532,68
25	PLTU Adipala	CDB	14/10/09	13	3	Eq. USD	625.256.803	543.430.129,13
26	PLTU Sumbar	CDB	14/10/09	13	3	USD	138.336.845	122.308.615,95
27	PLTU Lampung & Sumut USD - PLTU Lampung - PLTU Sumatera Utara	BRI	14/10/09	10	3	Eq. IDR	3.941.771.952.000	2.242.277.290.857
28	PLTU Tanjung Awar-Awar	BOC	14/12/09	13	3	USD	371.509.145	283.229.255,33
29	Transmisi Paket 1	BNI	14/12/09	10	3	IDR	1.930.063.301.000	1.415.005.819.429
30	Transmisi Paket 2	MANDIRI	14/12/09	10	3	IDR	2.613.011.648.000	1.681.991.624.350
31	Transmisi Paket 3 (IDR)	BCA	14/12/09	10	3	IDR	327.195.149.528	134.782.416.768,30
32	PLTU Riau 1, 2 & Kalbar - PLTU Bengkalis - PLTU Selat Panjang - PLTU Parit Baru	BCA	14/12/09	10	3	IDR	635.929.225.249	114.692.209.088,46

No	Proyek	Lender	Loan Signing	Tenor	Grace Period	Plafond		Outstanding
33	PLTU Riau 1, 2, Kepri & Kalbar - PLTU Bengkalis - PLTU Selat Panjang - PLTU Parit Baru - PLTU Kepri	BCA	14/12/09	10	3	Eq. IDR	871.922.300.000	350.350.955.714,29
34	Transmisi Paket 3 (Valas)	BRI	27/12/10	10	3	Eq. IDR	1.067.683.579.600	856.886.000.000
<b>Total Eksposure</b>						USD	<b>3.958.718.574</b>	<b>3.223.622.734</b>
						IDR	<b>36.105.992.211.891</b>	<b>22.157.879.454.242</b>

2. Program percepatan penyediaan air minum yang dilaksanakan oleh PDAM per 31 September 2013

Pihak Terjamin	Lender	Loan Signing	Tenor	Grace Period	Nilai	Outstanding
PDAM Kab. Ciamis	BJB	11/10/11	8	-	14.700.000.000	12.831.094.772
PDAM Kab. Bogor	BRI	11/10/11	8	1	24.312.000.000	22.078.794.082
PDAM Kab. Lombok Timur	BNI	11/10/11	13	1	11.175.000.000	4.499.752.000
PDAM Kota Malang	BNI	18/09/12	9	2,5	44.974.000.000	4.236.000.000
PDAM Bandarmasih	Bank Kalsel	21/09/12	10	1,5	110.000.000.000	77.000.000.000
<b>Eksposure Penjaminan (IDR)</b>					<b>205.161.000.000</b>	<b>120.645.640.854</b>

3. Program pembangunan pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan energi terbarukan, batubara, dan gas (FTP II) yang dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) per 31 September 2013

Proyek	Penerima Jaminan	Nilai
PLTP Rajabasa	PT. Supreme Energy Rajabasa	663.328.250
PLTP Muaralaboh	PT. Supreme Energy Muaralaboh	602.669.500
PLTA Wampu	PT. Wampu Electric Power	174.168.238
PLTP Rantau Dedap	PT. Supreme Energy Rantau Dedap	664.049.500
PLTP Sarulla	Sarulla Operation Ltd	1.399.486.000
<b>Eksposure Penjaminan</b>	<b>USD</b>	<b>3.503.701.488</b>

4. Program Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) per 31 September 2013

Proyek	Penerima Jaminan	Nilai
PLTU Jawa Tengah (CJPP)	PT. Bhimasena Power Indonesia	3.200.000.000
<b>Eksposure Penjaminan</b>	<b>USD</b>	<b>3.200.000.000</b>